

**PERKEMBANGAN IPS TERPADU DI INDONESIA : DALAM PERSPEKTIF
SEJARAH PENDIDIKAN NASIONAL**

Alimuddin Hassan Palawa

alimuddin@uin-suska.ac.id

Zacky Ramadhan

zackynamadhanp@gmail.com

Afifah Aththahirah

aa.afifah34@gmail.com

Ali Saudi Harahap

saudiharajap@gmail.com

UIN SUSKA Riau

Abstract

The development of Integrated Social Studies (IPS) in Indonesia from the perspective of national education history. Social studies education plays a crucial role in shaping students' understanding of social life, critical thinking, and awareness and responsibility as citizens. However, the journey of social studies in Indonesia is inseparable from the dynamics of changes in the national curriculum and education policies, which have continuously evolved over time. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, examining various sources such as books, scientific journals, curriculum documents, and previous research. The results indicate that the concept of Integrated Social Studies in Indonesia originated from an adaptation of the social studies model in the United States and then underwent a process of integration in accordance with the values of Pancasila and national education needs. Through curriculum changes from 1975 to the Merdeka Curriculum, the approach to social studies learning in Indonesia has increasingly emphasized integration, social context, and relevance to students' real lives. The conclusion of this study indicates that the development of Integrated Social Studies in Indonesia is the result of a long and dynamic historical process. Integrated social studies education not only broadens students' insights into social phenomena but also fosters critical, reflective, and adaptive social character in response to changing times. Therefore, strengthening the concept of integration and innovation in social studies learning is crucial for achieving national education goals in the global era.

Keywords : Integrated social studies, history of national education, curriculum, educational development, social studies.

Abstrak

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu di Indonesia dalam perspektif sejarah pendidikan nasional. Pendidikan IPS memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik agar memahami kehidupan sosial, berpikir kritis, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, perjalanan IPS di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional yang terus berkembang dari masa ke

masa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kurikulum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep IPS Terpadu di Indonesia berawal dari adaptasi model social studies di Amerika Serikat, kemudian mengalami proses integrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan pendidikan nasional. Melalui perubahan kurikulum sejak tahun 1975 hingga Kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran IPS di Indonesia semakin menekankan keterpaduan, konteks sosial, dan relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan IPS Terpadu di Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan dinamis. Pendidikan IPS Terpadu tidak hanya memperluas wawasan peserta didik terhadap fenomena sosial, tetapi juga membentuk karakter sosial yang kritis, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan konsep keterpaduan dan inovasi pembelajaran IPS menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di era global.

Kata kunci : IPS Terpadu, sejarah pendidikan nasional, kurikulum, perkembangan pendidikan, social studies.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dalam konteks tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran penting sebagai mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Campbell (1989) menganjurkan agar setiap guru dapat mengembangkan kesadaran sosial bagi para siswanya sejak dini, yakni pada tingkat pendidikan dasar. IPS tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan IPS menjadi salah satu komponen strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Perkembangan IPS di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan pendidikan nasional yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan kebijakan kurikulum. Pada awalnya, IPS diadopsi dari konsep social studies yang berkembang di Amerika Serikat sebagai upaya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh. Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam sistem pendidikan Indonesia dengan berbagai penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal, kebutuhan bangsa, serta arah pembangunan pendidikan nasional.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan IPS di Indonesia mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi kurikulum maupun pendekatan pembelajaran. Pada masa-masa awal, IPS masih diajarkan secara terpisah menurut disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi,

dan sosiologi. Namun, melalui perkembangan kurikulum mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, 2013, hingga Kurikulum Merdeka konsep keterpaduan semakin ditekankan. Pendekatan IPS Terpadu kemudian muncul sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang menggabungkan berbagai bidang ilmu sosial secara holistik agar lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.

Kajian mengenai perkembangan IPS Terpadu penting dilakukan untuk memahami bagaimana perubahan paradigma pendidikan nasional berpengaruh terhadap arah pembelajaran IPS di Indonesia. Dengan menelusuri sejarah dan dinamika perkembangannya, kita dapat melihat sejauh mana penerapan IPS Terpadu telah berkontribusi dalam membentuk kompetensi sosial peserta didik yang kritis, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan IPS Terpadu di Indonesia dalam perspektif sejarah pendidikan nasional serta menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi proses evolusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan IPS Terpadu di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kurikulum, peraturan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi terhadap literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah perkembangan IPS dan kebijakan pendidikan nasional. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan isi sumber, menginterpretasikan makna, serta mengaitkannya dengan konteks perkembangan kurikulum di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana IPS Terpadu berkembang dari masa ke masa serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam kerangka sejarah pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan dasar dan menengah, secara historis muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum tahun 1975. IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu (*integrated*), interdisipliner, multidimensional bahkan *cross-diciplinary*. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas. Dinamika cakupan semacam itu dapat dipahami mengingat semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin IPS, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. Dengan demikian diharapkan pendidikan IPS terhindar dari sifat ketinggalan zaman, disamping keberadaannya yang diharapkan tetap koheren dengan perkembangan sosial yang terjadi.

Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu ilmu yang mengkaji interaksi sosial manusia, yang meliputi interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam. Ilmu pengetahuan sosial merupakan sebuah keterpaduan dari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan sosial yang dikemas menjadi satu wadah yang diajarkan bagi siswa yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan dengan lingkungan alam atau antar manusia untuk beradaptasi yang diorganisasikan kedalam berbagai macam sub disiplin ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi.

Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut:

1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
2. Laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut.
3. Agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat.

Keberadaan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kurikulum yang pernah diterapkan di negara ini. Para ahli menjelaskan bahwa secara embrional, pendidikan IPS sudah mulai diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan formal sejak tahun 1947, kemudian dilanjutkan pada kurikulum berpusat pada mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum tahun 1964, dan kurikulum tahun 1968.

Selanjutnya, barulah pada kurikulum tahun 1975, 1984, dan 1994, IPS ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sistem kurikulum di Indonesia tidak lagi bersifat terpusat atau nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan kurikulum menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum yang diterapkan dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya memiliki kewenangan dalam menetapkan standar nasional, termasuk penyusunan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang kemudian diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

A. Pendidikan IPS pada Tahun 1945-1964.

Pada periode tahun 1945 hingga 1964, istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) belum dikenal di Indonesia. Meskipun demikian, kegiatan pembelajaran yang memiliki kesamaan dengan karakteristik IPS sudah ada dan mengacu pada pengertian social studies menurut Edgar Wesley, yang mendefinisikan pendidikan IPS sebagai ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini tampak dari adanya mata pelajaran seperti sejarah, geografi, kewarganegaraan, dan koperasi yang diajarkan secara terpisah di tingkat sekolah dasar, serta mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di tingkat sekolah menengah.

B. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1964-1968.

Pada Kurikulum 1964, terjadi perubahan pendekatan dalam pengajaran ilmu sosial di Indonesia, meskipun istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) belum dikenal secara resmi. Menurut Dimiyati, pendekatan yang digunakan pada masa itu bersifat korelatif, yaitu mengaitkan beberapa cabang ilmu sosial. Dalam kurikulum ini terdapat mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan, yang merupakan gabungan dari Ilmu Bumi, Sejarah, dan Civics. Selanjutnya, pada tahun 1968, kurikulum kembali mengalami perubahan dengan munculnya pengelompokan mata pelajaran yang disesuaikan dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada masa inilah istilah Pendidikan Kewarganegaraan mulai digunakan untuk menggantikan Pendidikan Kemasyarakatan, yang tetap merupakan hasil korelasi antara Ilmu Bumi, Sejarah, dan Pengetahuan Kewarganegaraan.

Istilah IPS mulai dikenal ketika Kurikulum 1968 masih berlaku, tepatnya pada Seminar Nasional Civics Education di Tawangmangu, Solo, tahun 1972. Berdasarkan laporan seminar tersebut, menurut Winataputra, muncul tiga istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Ketiganya diartikan sebagai kajian terhadap berbagai masalah sosial yang dipilih serta dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner, dengan tujuan agar siswa mampu memahami permasalahan sosial di lingkungan mereka. Sebagai mata pelajaran, IPS pertama kali diterapkan pada tahun 1972–1973 melalui Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Namun, pada masa itu IPS belum diajarkan di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dalam Kurikulum SD delapan tahun PPSP, sebagaimana dijelaskan oleh Winataputra, digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara atau Studi Sosial sebagai bentuk mata pelajaran sosial terpadu. Dengan demikian, IPS pada masa tersebut dipahami sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara resmi mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1975. Pada tahun tersebut, IPS ditetapkan sebagai mata pelajaran dan dimasukkan ke dalam sistem kurikulum nasional. Sebagai mata pelajaran baru, IPS diajarkan di jenjang SD, SMP, dan SMA dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan serta karakteristik peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Menurut Winaputra (2001), pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975 diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Pendidikan Moral Pancasila, yang menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai bentuk pendidikan IPS khusus yang berfungsi mewadahi tradisi citizenship transmission (penanaman nilai kewarganegaraan).
- 2) Pendidikan IPS Terpadu (integrated) untuk jenjang Sekolah Dasar.
- 3) Pendidikan IPS Terkonfederasi untuk tingkat SMP, di mana IPS berperan sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
- 4) Pendidikan IPS Terpisah di jenjang SMA, yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta di SPG (Sekolah Pendidikan Guru) mencakup sejarah dan geografi.

D. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1984.

Pengajaran IPS dalam Kurikulum 1984 di sekolah, khususnya pada jenjang menengah, disusun berdasarkan disiplin ilmu sosial yang terpisah untuk setiap mata pelajaran. Artinya, IPS diajarkan secara terpisah di tingkat pendidikan menengah. Secara umum, pelaksanaan pendidikan IPS dalam Kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami banyak perubahan, karena kurikulum ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Kurikulum 1975.

E. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994.

Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994 mengalami sejumlah perubahan sebagai dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Melalui undang-undang tersebut dilakukan peninjauan terhadap mata pelajaran IPS, terutama pada perubahan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selain itu, Kurikulum 1994 juga mengatur ulang konten pendidikan IPS yang menurut Sapriya (2017) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Untuk jenjang SD, IPS masih menggunakan pendekatan terpadu (integrated) dan berlaku bagi kelas III hingga VI, sedangkan untuk kelas I dan II belum diterapkan secara eksplisit. Di dalamnya, materi IPS dibagi menjadi dua bagian, yaitu materi sejarah dan materi pengetahuan sosial.
- 2) Untuk jenjang SMP, pendekatan IPS masih bersifat terkonfederasi (corelated), yaitu mencakup beberapa bidang ilmu sosial seperti geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
- 3) Untuk jenjang SMA, IPS diajarkan dengan pendekatan terpisah-pisah (separated), yang terdiri atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994 dirancang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Meskipun pendekatan yang digunakan di SD dan SMP bersifat terpadu, pada praktiknya masih tampak adanya pemisahan materi antarbidang IPS, sehingga pendidikan IPS belum sepenuhnya terintegrasi. Sementara itu, di jenjang SMA, IPS tetap diajarkan secara terpisah menurut disiplin ilmunya.

F. Pendidikan IPS dalam Permendiknas.

Memasuki era abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik, hukum, dan ekonomi, sistem pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003, disahkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini membawa dampak besar terhadap perubahan kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan standar nasional sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan pendidikan. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, sempat muncul wacana penggabungan mata pelajaran IPS dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi satu mata pelajaran baru bernama PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Gagasan ini muncul karena kedua mata pelajaran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, serta untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di sekolah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin mempertegas dan memperkuat kedudukan mata pelajaran IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Pasal 37 disebutkan bahwa IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 37 dijelaskan bahwa bahan kajian Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan bidang lain yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

G. Kurikulum IPS tahun 2006 (KTSP).

Pendidikan IPS tahun 2006 mengalami perubahan besar dalam isi dan pendekatan pembelajarannya. Pergeseran konsep dari mengajar menjadi pembelajaran menekankan pentingnya penguasaan materi minimal melalui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini melahirkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas (mastery learning) yang kemudian menjadi dasar lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Setelah dievaluasi, kurikulum tersebut disempurnakan menjadi Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

KTSP diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dalam

peraturan tersebut ditetapkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi guru dalam pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa, asalkan tidak mengurangi muatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS belum mencakup seluruh disiplin ilmu sosial, tetapi diarahkan untuk membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta perdamaian. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan terpadu (integrated) yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Untuk Tingkat SMP dan SMA, IPS juga diajarkan dengan pendekatan berbeda. Di SMP, pembelajaran disebut IPS terpadu karena memadukan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, meskipun praktiknya masih sering terpisah. Sedangkan di SMA, IPS diajarkan secara terpisah sesuai disiplin ilmu, seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Struktur mata pelajaran IPS di SMK mengikuti pola yang sama seperti di SD dan SMP.

H. Kurikulum IPS tahun 2013.

Perkembangan kurikulum berikutnya terjadi pada tahun 2013, ketika pemerintah melakukan peninjauan dan merancang kurikulum baru yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Implementasi Kurikulum 2013 banyak dipengaruhi oleh perubahan regulasi di tingkat pemerintahan pusat, termasuk pergantian kepala negara dan pejabat terkait lainnya. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan antara perancang kurikulum dan pembuat kebijakan yang baru, sehingga Kurikulum 2013 belum sepenuhnya diterapkan sudah mengalami revisi. Revisi tersebut ditetapkan melalui Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Perubahan penting dalam kurikulum ini terlihat pada istilah “standar kompetensi” yang diganti menjadi “kompetensi inti.” Pergantian ini menekankan pada pengembangan sikap spiritual dan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki peserta didik sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama telah mengalami pengintegrasian materi yang lebih kuat. Pembelajarannya menggunakan model keterpaduan (integrated), yaitu model yang mengaitkan berbagai topik dari beberapa bidang ilmu yang saling beririsan untuk membentuk pemahaman yang utuh. Sementara itu, pada tingkat sekolah menengah atas (SMA), pembelajaran IPS masih diajarkan secara terpisah atau berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Pendekatan ini

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki dasar pengetahuan yang kuat sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

I. Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan program yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, sebagai bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi pendidikan yang sesungguhnya. Konsep ini menekankan kebebasan dan otonomi bagi lembaga pendidikan dalam menafsirkan kompetensi dasar kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Kemendikbud (2020–2021), Merdeka Belajar memberikan ruang bagi dosen untuk terbebas dari birokrasi yang rumit, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa memilih bidang yang sesuai dengan minatnya. Secara umum, Merdeka Belajar bertujuan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi, berpikir kreatif, serta belajar secara mandiri.

Kurikulum ini lahir sebagai respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat terhadap sistem pendidikan sebelumnya, terutama mengenai tuntutan nilai ketuntasan minimal pada setiap mata pelajaran. Melalui Kurikulum Merdeka, diharapkan tercipta suasana belajar yang menyenangkan baik bagi peserta didik maupun pendidik. Program ini membawa beberapa implikasi penting, seperti penyederhanaan kurikulum, penggantian ujian nasional menjadi asesmen kompetensi dan karakter, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta peningkatan profesionalisme guru.

Penyederhanaan kurikulum dilakukan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Ujian Nasional diganti menjadi asesmen kompetensi dan karakter karena dinilai terlalu membebani sekolah dan siswa. RPP juga disederhanakan dari 10–13 komponen menjadi hanya tiga, sehingga guru lebih mudah merancang pembelajaran yang interaktif. Menurut Lie (2020), langkah ini membuat guru dan siswa lebih bahagia dalam proses belajar mengajar, karena tidak lagi tertekan oleh administrasi yang rumit. Dalam Kurikulum Merdeka, peran guru bergeser dari sekadar sumber pengetahuan menjadi mitra belajar bagi siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan. Guru diberi kebebasan menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai karakteristik kelasnya. Jika menghadapi kendala, guru didorong untuk kreatif mencari solusi yang tepat dan kontekstual. Dengan demikian, Merdeka Belajar menjadi pendekatan pendidikan yang berorientasi pada kebebasan berpikir, kemandirian, dan kebahagiaan dalam proses belajar mengajar.

Karakteristik Guru dalam Pengembangan Pembelajaran IPS.

Ada lima kriteria yang hendaknya dapat menjadi kemampuan yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam diri guru IPS SD ketika mengembangkan materi pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran IPS di SD sebaiknya diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial yang mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap tentang kebudayaan, ruang dan waktu, perubahan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan, serta kegiatan ekonomi seperti produksi dan konsumsi. Semua itu bertujuan agar siswa mampu mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis di tengah keberagaman Indonesia dan dinamika global.
- 2) Pembelajaran IPS juga perlu mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, yaitu keterampilan memahami dan menanggapi fenomena sosial di sekitar, serta mengemukakan gagasan berupa konsep, nilai, norma, atau sikap sosial. Selain itu, siswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai fenomena interaksi, perkembangan masyarakat, dan hubungan saling ketergantungan antarnegara di dunia.
- 3) Pembelajaran IPS hendaknya melatih kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial melalui penggunaan peta, atlas, bola dunia, data, dan media massa sebagai sumber informasi. Siswa perlu dibimbing untuk mengenali masalah, mencari informasi, mengeksplorasi alternatif solusi, dan menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan persoalan sosial-kultural yang mereka hadapi.
- 4) Pembelajaran IPS di SD juga harus membiasakan siswa untuk peka, tanggap, dan kritis terhadap lingkungan sekitar. Siswa perlu diarahkan agar mampu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak demi kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Mereka pun diharapkan terbiasa berpikir kritis dengan menganalisis sebab-akibat, hubungan antarfenomena, serta menarik kesimpulan logis dan sistematis terhadap peristiwa sosial yang terjadi.
- 5) Akhirnya, pembelajaran IPS harus menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis masalah sosial secara terpadu, sehingga muncul kesadaran akan adanya keterkaitan antarfenomena dan gagasan. Dengan begitu, siswa dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, dinamis, dan harmonis.

Implementasi Pembelajaran IPS Terpadu.

Pembelajaran IPS Terpadu secara penuh, dalam implementasinya dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, terpadu dengan gurunya, dan kategori kedua terpadu dalam materi pelajarannya dengan menggunakan model-model pembelajaran IPS Terpadu. Tujuannya: membangun pemahaman holistik, keterampilan berpikir tingkat tinggi (analisis, sintesis, evaluasi), kemampuan pemecahan masalah sosial, dan sikap warga yang demokratis. Dalam praktiknya, “penuh” bisa terealisasi lewat dua jalur utama: integrasi pada guru (satu guru mengelola keseluruhan) atau integrasi pada materi (materi disusun tematik/terpadu namun bisa diajarkan secara kolaboratif).

1) Terpadu dengan Guru

Dalam kategori ini seorang guru Sejarah termasuk guru IPS yang lain (Geografi, Sosiologi dan Ekonomi) harus mengajar keempat materi pelajaran IPS, yaitu:

Satu guru memegang keseluruhan rangkaian IPS; guru merancang tema yang menggabungkan unsur sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi; semua aktivitas kelas dikaitkan pada tema itu kesinambungan pembelajaran, relasi konseptual jelas, mudah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kelas, lebih personal.

Contoh: Pembelajaran SMP dengan tema “Sumber Air di Desa Kita” dalam aspek Geografi: letak sungai, peta aliran air, aspek Sejarah: perubahan pemanfaatan sumber air oleh masyarakat lokal dari masa ke masa, Aspek Ekonomi: kegiatan ekonomi terkait air (pertanian/ikan). Aspek Sosiologi/kewargaan: aturan penggunaan air bersama, konflik akses, solusi komunitas. Metode yang digunakan proyek lapangan/peta konsep/presentasi kelompok/jurnal siswa.

2) Terpadu dalam materi pelajaran (model pembelajaran terpadu)

Konsep: Materi dikembangkan secara tematik/interdisipliner buku, silabus, SK-KD dipetakan berdasarkan tema dan pelaksanaan menggunakan model pembelajaran terpadu (inquiry-based, project-based, problem-based, place-based). Pengajaran bisa dilakukan oleh satu guru atau beberapa guru yang berkoordinasi (co-teaching). Kelebihan: mata pelajaran tetap memperoleh kedalaman disiplin jika diperlukan, mudah mengaitkan SK/KD formal, memfasilitasi kolaborasi antar guru.

Contoh: dalam pembelajaran (SMP): tema “Urbanisasi & Dampaknya” Guru IPS dan guru PKn kolaborasi: sesi analisis data migrasi, debat kebijakan lokal, tugas membuat

poster advokasi. Model yang umum dipakai: Project-Based Learning (PjBL), Inquiry Learning, Thematic Learning.

KESIMPULAN

Perkembangan IPS Terpadu di Indonesia menunjukkan adanya proses historis yang panjang dan dinamis, sejalan dengan perubahan arah kebijakan pendidikan nasional. IPS awalnya diadaptasi dari konsep social studies yang berkembang di Amerika Serikat, kemudian diintegrasikan dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat. Melalui perjalanan kurikulum sejak tahun 1975 hingga Kurikulum Merdeka, pendidikan IPS di Indonesia mengalami transformasi dari pembelajaran yang bersifat disipliner menuju pendekatan yang lebih terpadu, tematik, dan kontekstual.

Penerapan IPS Terpadu tidak hanya memperluas wawasan peserta didik tentang fenomena sosial, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, sikap toleran, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dalam konteks pendidikan nasional, IPS Terpadu berperan penting dalam membentuk warga negara yang demokratis, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan konsep keterpaduan dan inovasi pembelajaran IPS menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, Carolina Sri Athena Barus, Dkk, Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Ips Di Indonesia: Sebuah Systematic Review, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* Volume 9 Nomor 3.
- B. Hidayat, Tinjauan Historis Pendidikan Ips Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2020
- Ma'rufah Rohmanurmeta Fauzatul, Candra Dewi, (2019), Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, (Jawa Timur: Unipma Press (Anggota Ikapi).
- Musyarofah, Abdurrahman Ahmad, Dkk, (2021), Konsep Dasar IPS, (Depok: Komojoyo Press (Anggota Ikapi)
- Nashrullah, (2022), Pembelajaran Ips (Teori Dan Praktik), (Kalimantan Seltan: CV. El Publisher)
- Nasution Toni, Maulana Arafat Lubis, (2018), Konsep Dasar IPS, (Yogyakarta: Samudra Biru).
- Nur Fauziah Nabilla, Randita Lestari, Dkk, Perkembangan Pendidikan IPS Di Indonesia Pada Tingkat Sekolah Dasar, Dalam *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 6, No. 1, 2022.
- Saadah Ramadhani Naila, Aditya Widiawan, Dkk, Pengembangan Kurikulum Dan Pengorganisasian Pengalaman Belajar IPS Siswa Sekolah Dasar, Dalam *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan Pkm Bidang Ilmu Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2024.

Sakilah, (2019), Konsep Dasar IPS, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus).

Susanti Eka, Henni Endayani, (2018), Konsep Dasar IPS, (Medan:CV. Widya Puspita).

Susanti Emilia, Akmal, (2025) Pengantar IPS Terpadu Dan Pembelajarannya,
(Pekanbaru:Kreasi Edukasi).